

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Allah SWT, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Renstra diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Perubahan Renstra ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi SKPD untuk mengarahkan pelayanan SOPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan serta harus mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar yaitu :

1. Apa yang hendak dicapai oleh SOPD dalam 5 (lima) tahun kedepan?
2. Bagaimana cara mencapainya ?
3. Langkah-langkah strategi apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan?

Selain dari itu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis ini adalah dalam rangka mewujudkan Good Governance yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

Kami menyadari Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis khususnya.

Demikian Perubahan Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam berupaya mewujudkan visinya.



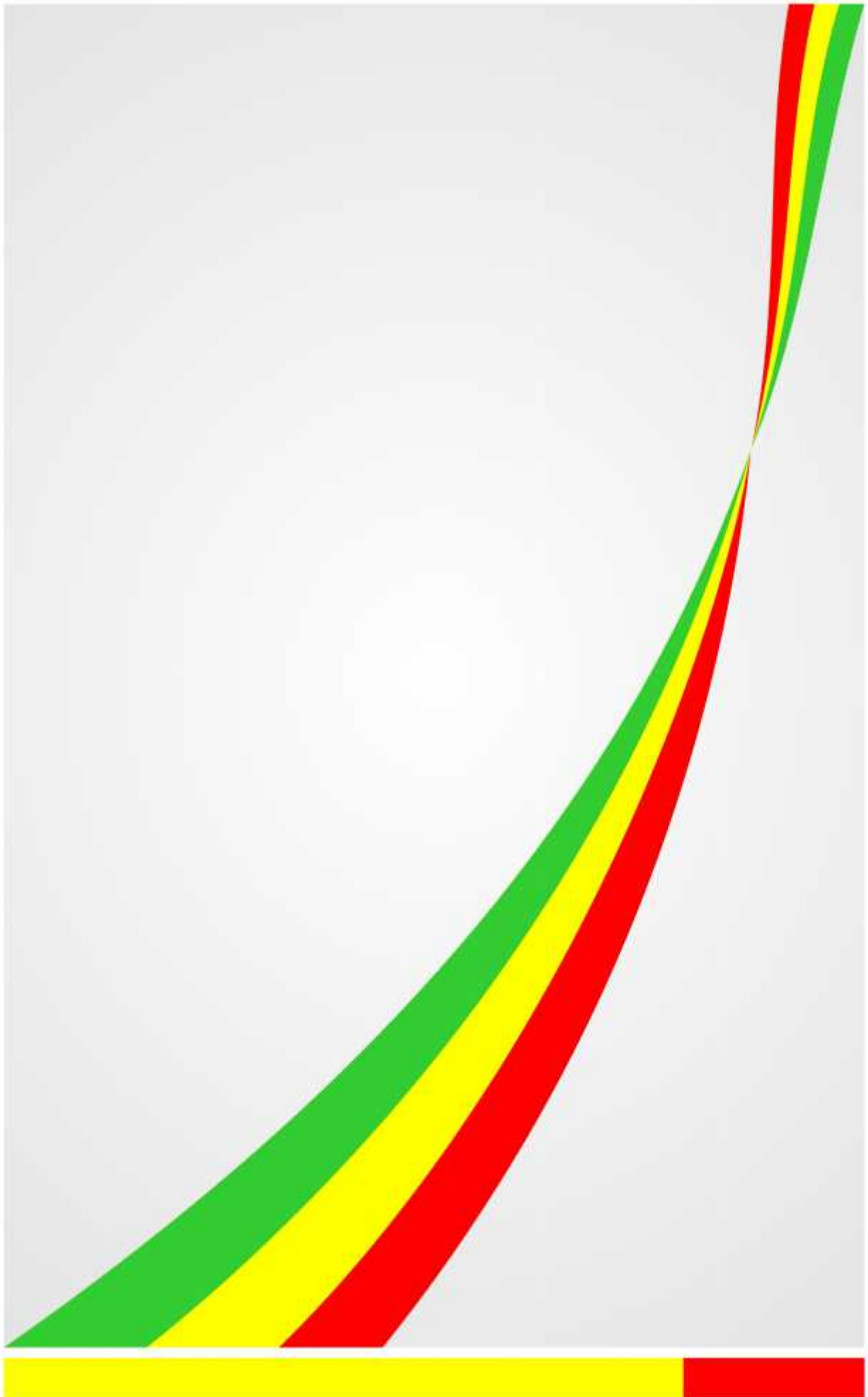
Bengkalis, JULI 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

H. IMAM HAKIM, SP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631112 199003 1 005

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
LAMPIRAN II	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR DIAGRAM	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Sistematika	6
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN SOPD	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.2. Sumber Daya SOPD	14
2.3. Kinerja pelayanan SOPD	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis	18
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	20
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayananan SOPD	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Terpilih	20
3.3. Telaahan Rencana Kementerian/Lembaga Dan Renstra Provinsi	21
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	23
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	25
4.1. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis	25
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis	27
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
5.1. Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis	29
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	32
6.1. Rencana Program Dan Kegiatan	32
6.2. Indikator Kinerja Dan kelompok Sasaran	38
6.3. Pendanaan Indikatif	43
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB VIII : PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

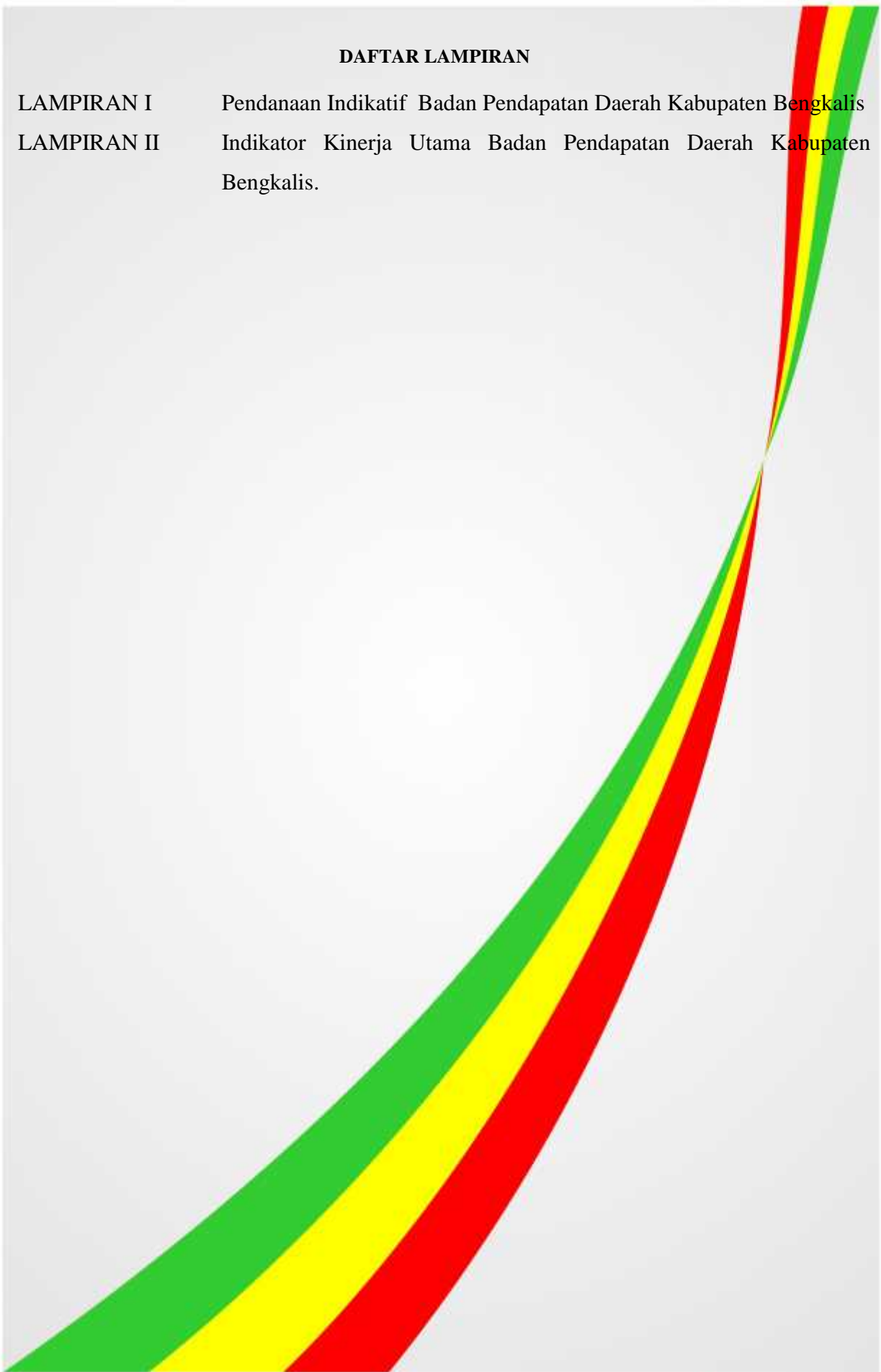
Tabel 2.1.	Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 2.2.	Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.3.	Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2.4.	Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Status Kepagawaian	15
Tabel 2.5.	Sarana Dan Prasarana Pada Dinas Pendapatan daerah kabupaten Bengkalis	16
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 – 2015	17
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis	17
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021	28
Tabel 5.1.	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis & Kebijakan	30
Tabel 5.2.	Target Sasaran Tahun 2016 - 2021	31
Tabel 6.1	Kegiatan Pada Program Rutin / Operasional dan Indikator Kinerja	35
Tabel 6.2	Kegiatan Pada Program Prioritas dan Indikator Kinerja	37
Tabel 6.3	Indikator Hasil dan Kelompok Sasaran Pelaksanaan Program Rutin/ Penunjang Operasional Periode Tahun 2016 - 2021	38
Tabel 6.4	Indikator Hasil dan Kelompok Sasaran Program Prioritas Periode Tahun 2016 - 2021	41
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama	46

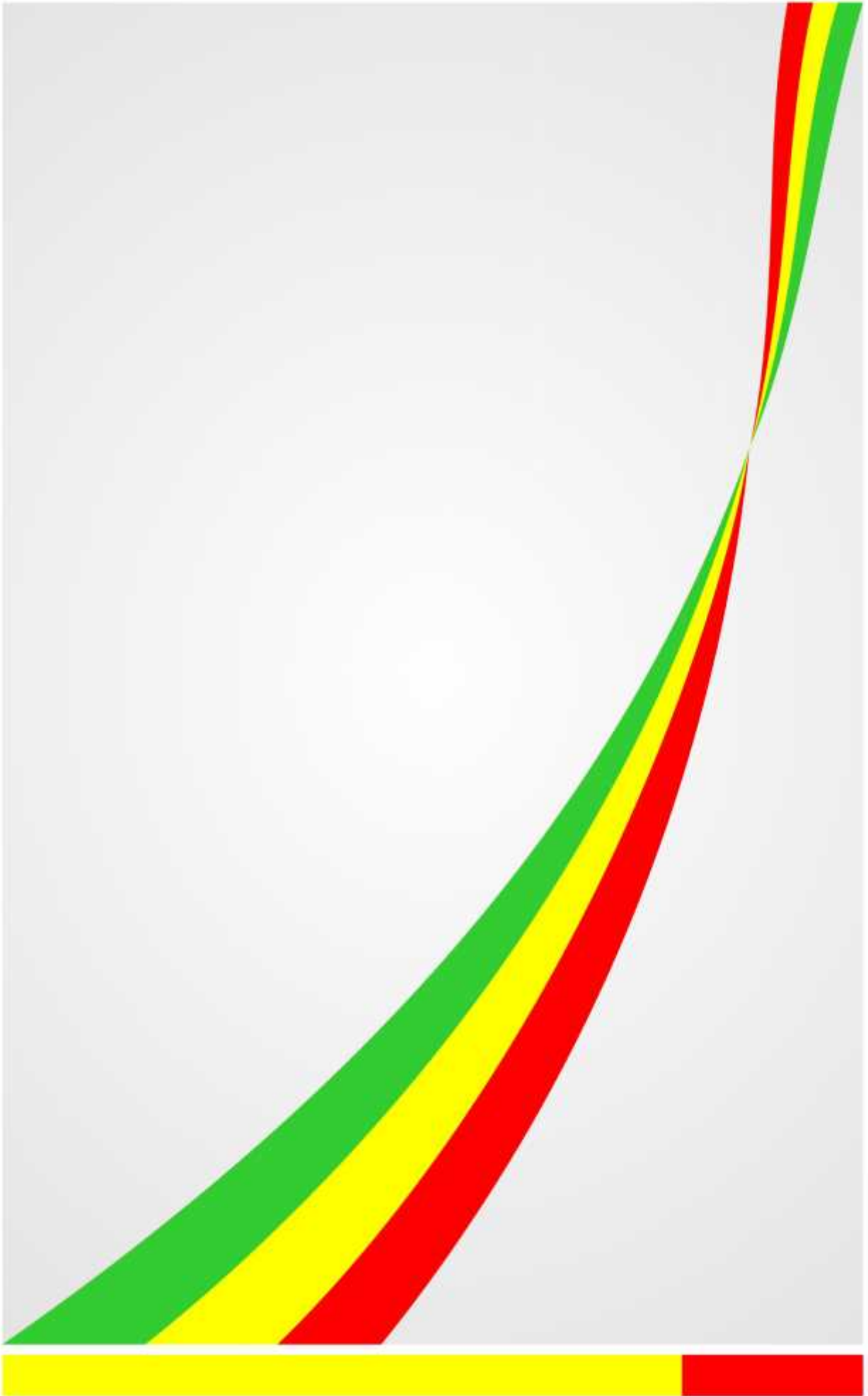
DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1. Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis	13
Diagram 6.1. Hubungan Umpan Balik antara RPJMD dengan Renstra	33
Diagram 7.1. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	45

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
LAMPIRAN II	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma desentralisasi dan otonomi daerah mengalihkan kewenangan yang berada ditangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Implikasi dari otonomi daerah menuntut aparatur pemerintahan yang berkemampuan berkualitas dan bermoral tinggi sehingga masyarakat memperoleh manfaat secara nyata. Agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik, maka pemerintah daerah beserta jajarannya perlu berfungsi dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis , sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana yang:

- a. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan What/Which, Why, When, Where, How dan Who;
- b. Pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan-perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
- c. Operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
- d. Ambisius tetapi sesuai dengan realita;
- e. Berkelangsungan/berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai, hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai;
- f. Fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
- g. Komprehensif;
- h. Skala prioritas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Daerah dibidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang pendapatan daerah;
- c. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pendapatan daerah;
- d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dibidang pendapatan daerah;
- e. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan dibidang pendapatan daerah;
- f. Penyelenggaran urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang pendapatan daerah;
- g. Pelaksanaan Administrasi Badan Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2), jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalan sumber pajak dan retribusi daerah Kebijakan meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bengkalis. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas maka Bapenda akan menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Rencana Strategis merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian

integral dari upaya Bapenda dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan Rencana Strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu periode tahun 2016-2021 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD termaksud merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, Renstra dan Renja tersebut, saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu terutama dalam mendukung pencapaian Misi ke 2 (Dua) RPJMD yaitu: **Mewujudkan Pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.**

Kerjasama dalam hal pengawasan pelaksanaan program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan rencana yang telah diprogramkan, perlu dukungan yang melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang indikasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga prinsip-prinsip pemerintahan (Good Governance) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utamanya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas berjalan dengan baik. Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, Rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD diwajibkan untuk menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu secara organisatoris telah merumuskan Rencana Strategi (Renstra) untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2016 –2021 yang sangat relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen strategik untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Rencana Strategis (Renstra) merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab

pemerintah daerah beserta masyarakatnya, maka dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021 sesuai dengan suatu dasar mengikat yaitu :

Landasan dalam penyusunan renstra pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu, adalah sebagai berikut :

1. Landasan Ideal yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
3. Landasan Operasional meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana ;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

- o. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- u. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, tugas Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan Daerah dengan pengelolaan belanja program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan 'guide line' dalam membuat prioritas pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Renstra SOPD adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- b. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT, PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain:

- a. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
- b. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 -2021.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SOPD) mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi SOPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program yang menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-SOPD) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SOPD yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat melihat konsistensi antara Renstra-SOPD dan Renja, RKT SOPD, maka dokumen Renja, RKT SOPD haruslah mempunyai keterkaitan dari Renstra-SOPD seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasaran, sedangkan program SOPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja dan RKT SOPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SOPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan.

Adapun manfaat Renstra yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Sistematika

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004, yakni: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu

dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kabupaten Bengkulu . Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-SOPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I PENDAHULUAN**
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.
- Bab II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SOPD**
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SOPD; sumber daya yang dimiliki oleh SOPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SOPD
- Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SOPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang pajak daerah.
- Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini berisi visi dan misi SOPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SOPD.
- Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Lima tahun mendatang.
- Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu.
- Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Berisi Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu.
- Bab VIII PENUTUP**
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SOPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SOPD

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SOPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SOPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, tugas Fungsi dan Uraian Tuga Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu mempunyai susunan dan struktur organisasi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum bidang perpajakan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu mempunyai susunan dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan ;dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bidang Pendaftaran;
 2. Sub Bagian Bidang Penilaian;
 3. Sub Bagian Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Bidang Penerimaan dan Pembukuan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bidang Dana Bagi Hasil;
 2. Sub Bagian Bidang Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB;
 3. Sub Bagian Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bidang Penagihan;
 2. Sub Bagian Bidang Keberatan dan Pengurangan;
 3. Sub Bagian Bidang Pemeriksaan
- f. Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bidang Analisa dan Pendapatan;
 2. Sub Bagian Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan;
 3. Sub Bagian Bidang Evaluasi Pemantauan
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas dan fungsi serta uraian tugas

KEPALA

1. Kepala mempunyai tugas Membantu Bupati, Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah;
2. Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah;
 2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah;
 3. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pendapatan Daerah;
 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pendapatan Daerah;
 5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Pendapatan Daerah;
 6. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 7. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian.
2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana, program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian rumah tangga Badan Pendapatan Daerah;
 3. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
 4. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 5. Pelaksanaan urusan Hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
 6. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

3. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas kegiatan-kegiatan menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Sub Bagian Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas kegiatan-kegiatan menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang KeuaNgan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

1. Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang Pendataan dan Pendaftaran;

2. Susunan Organisasi Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendaftaran;

Sub Bidang Pendaftaran mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pendaftaran;

2. Sub Bidang Penilaian;

Sub Bidang Penilaian mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang Penilaian;

3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang Pengolahan Data dan Informasi;

BIDANG PENERIMAAN DAN PEMBUKUAN

1. Bidang Penerimaan dan Pembukuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penerimaan dan pembukuan;
2. Susunan Organisasi Bidang Penerimaan dan Pembukuan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Dana Bagi Hasil;

Sub Bidang Dana Bagi Hasil mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang dana bagi hasil;
 2. Sub Bidang Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB;

Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 3. Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;

BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN

1. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penagihan dan keberatan;
2. Susunan Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penagihan;

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang penagihan;
 2. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan; dan

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang keberatan dan pengurangan;
 3. Sub Bidang Pemeriksaan.

Sub Bagian Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pemeriksaan;

BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang pengendalian dan pengembangan;
2. Susunan Organisasi Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Analisa dan Pendapatan;

Sub Bidang Analisa dan Pendapatan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang analisa dan pendapatan;
 2. Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan;

Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pengembangan dan perundang-undangan;
 3. Sub Bagian Bidang Evaluasi Pemantauan

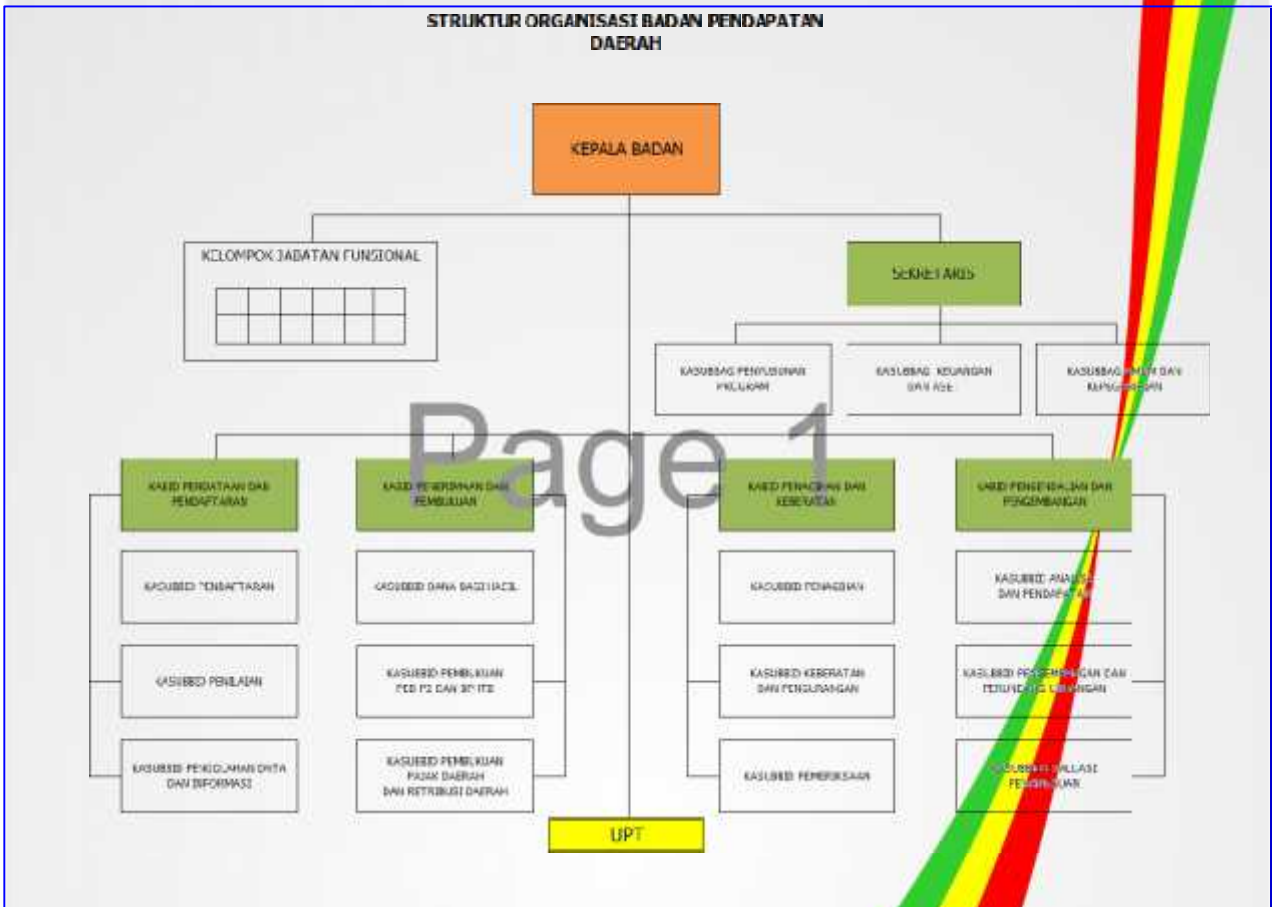
Sub Bidang Evaluasi Pemantauan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang evaluasi dan pemantauan;

UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
2. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu atau sebagai kepanjangan tangan Badan di Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Bengkalis;
3. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat ;
4. Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Diagram 2.1.

Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis



2.2. Sumber Daya SOPD

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur/Pegawai yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan jenis kelamin, golongan, dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

- 1) Komposisi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT	23	12	35
2	BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN	5	5	10
3	BIDANG PENERIMAAN DAN PEMBUKUAN	3	4	7
4	BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN	5	8	13
5	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN	9	6	15
6	UPT-PBB-P2	6	1	7
7	UPT KEC.BENGKALIS	8	5	13
8	UPT KEC.RUPAT	2	1	3
9	UPT KEC.RUPAT UTARA	2	0	2
10	UPT KEC.BANTAN	2	2	4
11	UPT KEC.SIAK KECIL	3	0	3
12	UPT KEC.BUKIT BATU	4	3	7
13	UPT KEC.PINGGIR	1	1	2
14	UPT KEC.MANDAU	5	4	9

- 2) Komposisi Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN					JUMLAH
		IV	III	II	I	PTT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT	3	12	20			35
2	BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN		4	3			7
3	BIDANG PENERIMAAN DAN PEMBUKUAN	1	6	3			10
4	BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN		8	5			13
5	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN		6	9			15
6	UPT-PBB-P2		2	5			7
7	UPT KEC.BENGKALIS		3	10			13
8	UPT KEC.RUPAT		1	2			3
9	UPT KEC.RUPAT UTARA		1	1			2
10	UPT KEC.BANTAN		1	3			4
11	UPT KEC.SIAK KECIL		1	1	1		3
12	UPT KEC.BUKIT BATU		2	5			7
13	UPT KEC.PINGGIR	1		1			2
14	UPT KEC.MANDAU		2	7			9

- 3) Komposisi pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SEKRETARIAT		2	8	1	24			35
2	BIDANG RETREBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN			4		3			7
3	BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAN NON PAJAK		1	3	1	5			10
4	BIDANG PENAGIHAN			6	2	5			13
5	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN		1	1	1	12			15
6	UPT-PBB-P2		1	1		5			7
7	UPT KEC.BENGKALIS			1	2	10			13
8	UPT KEC.RUPAT			1		2			3
9	UPT KEC.RUPAT UTARA				1	1			2
10	UPT KEC.BANTAN			1		3			4
11	UPT KEC SIAK KECIL					3			3
12	UPT KEC.BUKIT BATU			1		5	1		7
13	UPT KEC.PINGGIR			1		1			2
14	UPT KEC.MANDAU			1	1	7			9

- 4) Komposisi Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	UNIT KERJA	STATUS KEPEGAWAIAN					JUMLAH	
		PNS	HONORER					
			ADM	KEBERSIHAN	KEAMANAN	SUPIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SEKRETARIAT	35	5	7		8		55
2	BIDANG RETREBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	7	2					9
3	BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAN NON PAJAK	10	4					14
4	BIDANG PENAGIHAN	13	3					16
5	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN	15						15
6	UPT-PBB-P2	7	12					19
7	UPT KEC.BENGKALIS	13	3					16
8	UPT KEC.RUPAT	3	2	1		1		7
9	UPT KEC.RUPAT UTARA	2		1		1		4
10	UPT KEC.BANTAN	4	2	1		1		8
11	UPT KEC SIAK KECIL	3	2	1				6
12	UPT KEC.BUKIT BATU	7	2	1		1		11
13	UPT KEC.PINGGIR	2	2	1				5
14	UPT KEC.MANDAU	9	10	2		1	1	23
JUMLAH KESELURAHAN		130			78			208

Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebanyak 208 orang yang semuanya Pegawai Tetap dan memiliki kepangkatan yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Sarana dan Prasarana pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda 4	Unit	11
2	Sepeda Motor	Unit	40
3	AC	Unit	47
4	Mesin Photo Copy	Buah	4
5	Komputer	Unit	97
6	Printer	Unit	122
7	Proyektor + layar	Unit	1
8	Tv	Unit	5
9	Laptop	Unit	8
10	UPS	Unit	51
11	Alat porporasi	Unit	8
12	Mesin Penghancur kertas	Unit	5
13	Meja Kerja	Unit	150
14	Kursi Kerja	Unit	153
15	Filing Kabinet	Unit	30
16	Handycam	Unit	4
17	Gronding Ginset	Unit	1
18	Kamera	Unit	2
19	Lemari	Unit	10
20	Infokus	Unit	1
21	Kamera CCTV	Unit	1

Jumlah jenis barang/aset Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebanyak 21 jenis barang dengan jumlah keseluruhan barang sebanyak 751 buah/unit, jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan dan penunjang pelaksanaan program kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

2.3. Kinerja Pelayanan SOPD

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor yang Berkualitas	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %	85 %	90 %	90 %	95 %	84 %	85 %	90 %	90 %	95 %
2	Rasio Perlengkapan Kantor terhadap Kebutuhan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %	80 %	85 %	90 %	90 %	80 %	80 %	85 %	90 %	90 %
3	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Peneliti dan Pengre kayasaan	5 Org	12 Org	15 Org	20 Org	22 Org	1 Org	2 Org	0 Org	0 Org	0 Org	20 Org	17 Org	0 Org	0 Org	0 Org
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	50 %	55 %	60 %	55 %	60 %	56 %	61 %	67 %	61 %	67 %
5	Penjabaran Program Renstra kedalam Renja	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	60 %	65 %	65 %	70 %	70 %	67 %	72 %	72 %	78 %	78 %

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkalis

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		

Berdasarkan Tabel 2.6 tentang pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan bahwa, Rasio capaian kinerja sesuai dengan indikator tugas dan fungsi dapat dikatakan sudah baik, namun hanya ada 2 indikator yang masih dianggap kurang memuaskan terkait ketersediaan tenaga peneliti fungsional yang tidak didukung secara penuh dari instansi terkait serta dukungan anggaran yang kurang memadai sebagai sumber pendanaan pelaksanaan program yang mendukung RPJMD.

Pada Tabel 2.7 dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran sudah sangat baik sekali, hal ini dikarenakan Badan Penelitian dan Pengembangan telah dapat merealisasikan anggarannya rata-rata pertahun sebesar 95%. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sangat perlu dukungan dari beberapa instansi terkait serta dukungan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Bengkalis.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, dipengaruhi oleh sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis hal ini dilakukan melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) seperti :

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Adanya Political Will dari Kepala Daerah
- 2) Pertumbuhan pelaku usaha dan wisata yang tinggi.
- 3) Adanya dukungan peraturan hukum yang memadai.
- 4) Ketersediaan anggaran
- 5) Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai
- 6) Pimpinan yang visioner.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pajak dan Retribusi
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
3. Belum Tersedianya Standar Oprasional dan Prosedur SOPD
4. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi
6. Kualitas pelayanan belum optimal
7. Lemahnya penegakan aturan.
8. Rendahnya Kualitas Data.

c. Peluang (*Opportunities*)

1. Adanya Pembagian Kewenangan pengelolaan pajak dari pusat , Propinsi dan pemerintah daerah.
2. Pertumbuhan pelaku usaha dan wisata yang tinggi.
3. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang mendorong percepatan perekonomian daerah.
4. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa.
5. Stabilitas keamanan yang terjaga dengan baik
6. Perkembangan Teknologi Informasi
7. Dukungan Legislatif dan Yudikatif

d. Ancaman (*Threats*)

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak.

2. Peraturan yang selalu berubah.
3. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari Stakeholder.
4. Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak.
5. Pertumbuhan Ekonomi Relatif Lamban.
6. Menurunnya Produksi minyak.
7. Harga minyak yang tidak Stabil

Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis merumuskan Strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dalam melaksanakan misi guna mencapai visi dan misi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
3. Meningkatkan mutu administrasi perpajakan dengan didukung teknologi berbasis IT.
4. Meningkatkan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung mutu pelayanan
6. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah
7. Meningkatkan upaya penegakan hukum dibidang perpajakan daerah
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah
9. Melakukan pengkajian untuk menggali potensi daerah

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SOPD.

Permasalahan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- a. Belum sepenuhnya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran.
- b. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan kegiatan operasional yang telah direncanakan, sehingga hasil yang didapat belum maksimal dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian tertentu.
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung kegiatan operasional yang berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- d. Belum Tersedianya Standar Operasional dan Prosedur SOPD, sehingga kinerja mengalami hambatan dan belum dapat sepenuhnya menunjang peningkatan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah.
- e. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi yang terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah.
- f. Lemahnya penegakan aturan seperti penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum dilaksanakan secara tegas, ini belum dapat menunjang meningkatnya intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah.
- g. Rendahnya kualitas data sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan daerah .
- h. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan pelayanan penerimaan daerah sehingga mempengaruhi efektifitas dan efesiensi.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Penyusunan Rencana Strategis SOPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

VISI KABUPATEN BENGKALIS 2016 - 2021:

" TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI NEGERI MAJU DAN MAKMUR
DI INDONESIA "

MISI KABUPATEN BENGKALIS :

Sesuai dengan Visi yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Negeri Maju Dan Makmur di Indonesia ", maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spasial, yakni:

1. Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan Budaya Melayu Serumpun.
2. Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat.
3. Gerbang Permata, Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan.
4. Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Ruptat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA (KIL) DAN RENSTRA PROVINSI

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Pendapatan Provinsi Riau tidak terdapat korelasi langsung yang mempengaruhi penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bengkalis memiliki hubungan dengan Tujuan Strategis Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Riau sebagai berikut :

Tujuan Strategis Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Terjaganya kesinambungan Fiskal;
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan

Tujuan Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Mengurangi Ketergantungan Dana Perimbangan
3. Tergalinya sumber lain Pendapatan Daerah
4. Pengembangan Sistem manajemen Penerimaan daerah dengan berbasis teknologi informasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dan terciptanya keharmonisan ,terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan SDM; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang serta pengendalian program-program pembangunan dalam jangka panjang.

Struktur Ruang Kota

Secara garis besar, konsep pengembangan Kabupaten Bengkalis adalah yang terdiri dari 8 Kecamatan terbagi dalam 3 wilayah yang dibatasi oleh Laut, Kabupaten Bengkalis diarahkan mempunyai 1 pusat pelayan dan yang mempunyai peran sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Pasar Skala Regional dapat berupa pusat perbelanjaan dan pusat pertokoan.

2. Pusat Pelayanan Jasa Perbankan dan Perhotelan serta jasa umum skala regional lainnya.
3. Pusat Pelayanan Fasilitas
 - a. Peribadatan dan olah raga skala regional dan
 - b. Pemanfaatan Ruang Kota

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana adalah tersedianya dana yang cukup untuk membiayai setiap program pembangunan yang telah dirumuskan. Ketersediaan pembiayaan pembangunan Kabupaten Bengkalis tergantung kepada kondisi sumber-sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten, baik berupa pendapatan asli daerah (PAD) maupun berupa bagi hasil pusat dan bagi hasil pemerintah Provinsi serta dari sumber-sumber pendapatan sah lainnya.

Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam peningkatan penerimaan daerah adalah dengan mengotimalkan potensi dari pajak daerah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah yang berlaku.

3.5 Penentuan Isu-Isu strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu :

- 1) Belum optimalnya koordinasi dengan instansi yang terkait.
Hubungan kerja dengan instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih terkendala birokrasi dan belum terkoordinasi dengan baik, sehingga perlu dilaksanakan suatu hubungan yang baik dan terarah guna mendukung kegiatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam implementasi penggalian potensi pajak dan retribusi daerah.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi
Teknologi yang digunakan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah sampai saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Teknologi yang digunakan dirasakan sudah jauh ketinggalan dalam mendukung pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan perlu diupayakan teknologi baru sesuai dengan perkembangan zaman.
- 3) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak
Belum sepenuhnya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran.

4) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan operasional yang telah direncanakan, sehingga hasil yang didapat belum maksimal dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian tertentu.

Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk menghadapi dan mengatasinya yang tertuang dalam penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-SOPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode tahun 2016-2021 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

4. 1. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

a. Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Dalam menghadapi tantangan kedepan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai organisasi pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi Daerah. Upaya ini perlu terus menerus dikembangkan dengan tetap mencari peluang sebesar-besarnya serta melakukan inovasi sesuai dengan fungsi sebagai penunjang keuangan daerah. Selain hal tersebut dengan meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis perlu menerapkan Manajemen Strategis sebagai langkah awal dalam menentukan strategi ke depan tentang apa yang akan dilaksanakan. Dengan demikian tolak ukur dalam menilai kinerjanya dapat dievaluasi semaksimal mungkin dan obyektif. Untuk itu seluruh instansi terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah perlu memiliki suatu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, sehingga lebih memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang diinginkan .

Kata visi berasal dari kata vision yang dapat diterjemahkan sebagai pandangan jauh ke depan. Visi sebuah organisasi adalah pandangan umum dari cita-cita yang ingin diwujudkan oleh organisasi tersebut. Penggunaan kata visi biasanya dipadankan dengan kata misi. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah :

**"TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG
HANDAL DAN AKUNTABEL"**

Pernyataan visi diatas, menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah harus tetap menjadi motor penggerak dalam mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah sebesar-besarnya untuk membiayai pembangunan daerah yang berkesinambungan. Untuk menjelaskan pernyataan Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Potensial mengandung makna bahwa sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak (local taxing power), untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhan pengeluarannya. Penguatan pemungutan pajak daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetap mengacu pada prinsip menjaga keselarasan dengan kewenangan dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan dari berbagai sumber yang sah sesuai peraturan secara professional dan berkualitas.

b. Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten *Bengkalis*

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Proses perumusan Misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah:

- 1) Mewujudkan Kualitas Pelayanan Pendapatan.
- 2) Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah.
- 3) Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang handal dan akuntabel.

Dari pernyataan di atas menunjukkan adanya nilai-nilai yang terkandung dan perlu dikembangkan sebagai suatu keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai tersebut antara lain tanggungjawab, motivasi, komitmen, kerjasama, kebersamaan, profesional, transparan dan pengabdian.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dicapai dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis bersinergi dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Adapun tujuan dari Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Tujuan Misi 2 : Meningkatkan Pendapatan Daerah;
3. Tujuan Misi 3 : Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya, baik SDM, sarana dan prasarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Adapun sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Daerah

Indikator : - Presentase peningkatan Pajak Daerah.

- Presentase Penerimaan Pendapatan Daerah non Pajak Asli Daerah.

- Rasio PAD Terhadap APBD

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja

Indikator : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

2. Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Keuangan

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pelayanan Tepat Waktu • Indeks Kepuasan Masyarakat 	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak	• Persentase Pelayanan Tepat Waktu	-	60%	70%	80%	90%
			• Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85%	90%	95%	95%
Meningkatkan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Penerimaan Daerah • Persentase Peningkatan Pajak Daerah • Persentase Penerimaan Pendapatan Non Pajak Pendapatan Asli Daerah • Rasio PAD Terhadap APBD 	Meningkatnya Pendapatan Daerah	• Meningkatnya Penerimaan Daerah	20%	40%	60%	80%	100%
			• Persentase Peningkatan Pajak Daerah	20%	40%	60%	80%	100%
			• Persentase Penerimaan Pendapatan Non Pajak Pendapatan Asli Daerah	20%	40%	60%	80%	100%
			• Rasio PAD Terhadap APBD	7%	7%	8%	9%	10%
Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Predikat Akuntabilitas Kinerja • Presentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan 	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja	• Predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	BB	BB
			• Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan dapat bersifat internal maupun eksternal. Kebijakan bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, sedangkan kebijakan bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Selain dari itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah :

- Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak.
- Kebijakan : Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan pajak.
- Sasaran 2 : Meningkatkan Penerimaan Daerah
- Kebijakan : 1. Kebijakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah.
2. Kebijakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Non Pajak Daerah.
3. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD
- Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas Capaian Kinerja.
- Kebijakan : 1. Kebijakan meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja.
2. Kebijakan meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan Keuangan

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis & Kebijakan**

Visi : " TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG HANDAL DAN AKUNTABEL "				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Pendapatan				
Meningkatkan Kualitas pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Administrasi Perkantoran • Peningkatan Pendapatan Asli Daerah • Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Misi2 : Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan				
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan	Meningkatnya Penerimaan Daerah	1. Meningkatnya Penerimaan Daerah	Meningkatkan Penerimaan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
		2. Persentase Peningkatan Pajak Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
		3. Persentase Peningkatan Pendapatan Non Pajak Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Non Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
		4. Rasio PAD terhadap APBD	Meningkatkan Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Misi 3 : Mewujudkan Sistem Manajemen Pemerintahan yang Baik				
Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas Capaian Kinerja	1 . Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Administrasi Perkantoran • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		2. Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan.	Meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Memperhatikan kondisi dan perkembangan pajak dan retribusi daerah serta tantangan yang dihadapi untuk mencapai visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis maka ditetapkan program-program rutin/penunjang operasional dan program prioritas sebagai berikut:

1. Program rutin/penunjang operasional.

Program rutin/penunjang operasional merupakan program yang diperuntukan pada pelaksanaan operasional rutin administrasi perkantoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun 3 (tiga) program rutin/penunjang operasional adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2. Program prioritas

Program prioritas merupakan program yang secara khusus diperuntukan guna merealisasikan visi dan misi dibentuknya SOPD Didalam program prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 ini, pelaksanaannya lebih diarahkan dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya peningkatan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak Daerah di daerah Kabupaten Bengkalis. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2016-2021 telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) program prioritas yakni :

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021, telah ditetapkan target selama 5 tahun dari masing indikator sasaran yang telah disusun sebelumnya sebagai berikut :

TARGET SASARAN TAHUN 2016-2021

VISI TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG HANDAL DAN AKUNTABEL

MISI

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Pendapatan.
2. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan.
3. Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang handal dan akuntabel

Tabel 5.2.
Target Sasaran Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target 2016-2021	Rincian Target Kinerja Tahunan				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kualitas pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	-	85%	90%	95%	95%
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan	Meningkatnya Penerimaan Daerah	1. Meningkatnya Penerimaan Daerah	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		2. Persentase Peningkatan Pajak Daerah	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		3. Persentase Peningkatan Pendapatan Non Pajak Pendapatan Asli Daerah	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		4. Rasio PAD terhadap APBD	10%	7%	7%	8%	9%	10%
Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas Capaian Kinerja	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	CC	B	B	BB	BB
		2. Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sementara kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. Rencana program dan kegiatan merupakan proses penetapan rangkaian tindakan yang terorganisir dalam suatu program dan kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah menyusun program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah. Program dan kegiatan yang disusun ini memuat berbagai macam kebijakan yang tersusun secara terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Didalam program dan kegiatan tersebut terdapat indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai tujuan yang harus dicapai dan dapat digambarkan sebagai skala atau tingkatan yang digunakan.

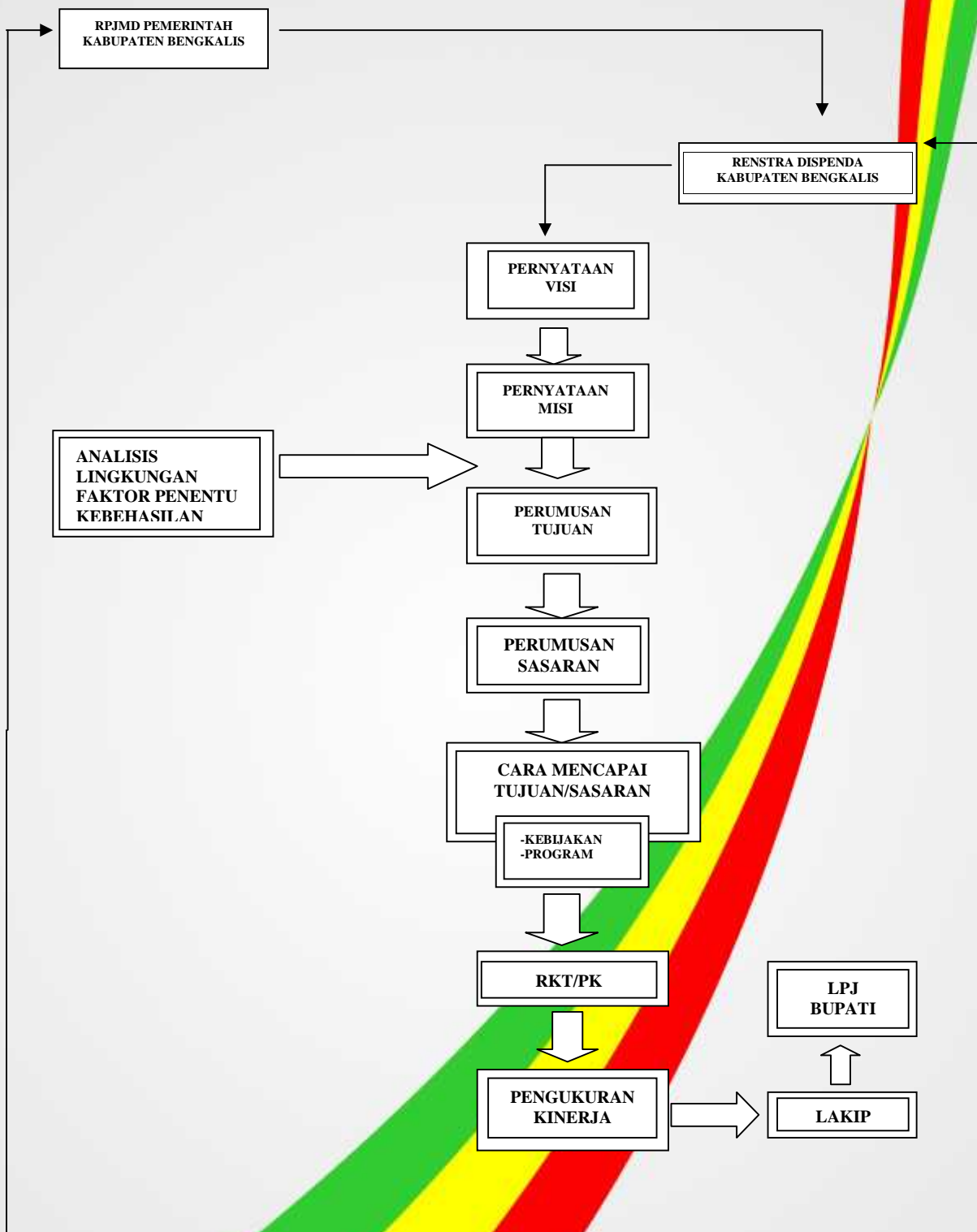
Indikator kinerja ini bisa sebagai alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

a. Program

Dalam rangka mencapai indikator program RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah menyusun indikator program tahun 2016-2021 Indikator program tersebut termuat dalam Rencana Strategis (renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Selengkapnnya hubungan antara RPJMD dengan renstra sebagai berikut :

Diagram 6.1.
HubunganUmpan Balik antara RPJMD dengan Renstra



Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila mempunyai satuan pengukuran yang dapat menggambarkan kondisi atau capaian yang mudah terukur. Dalam pembuatan satuan pengukuran perlu memperhatikan *output* dan *outcome* serta *impac* dari pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis masuk dalam Misi ke 2 dari RPJMD Kabupaten Bengkalis yaitu:

Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.

Tujuan ke 1 yaitu : Meningkatkan Perekonomian Rakyat.

Berdasarkan misi diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan 7 (Tujuh) program SKPD yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok program yaitu program rutin/penujang operasional dan program prioritas. Selengkapnya program pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

- 1) Program rutin/penunjang operasional, terdiri dari program :
 - a) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
 - d) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 2) Program prioritas, terdiri dari program :
 - a) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

b. Kegiatan

Untuk merealisasikan program yang termuat dalam Rencana Strategis (renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang terarah dan terorganisir dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan kegiatan merupakan cara pemanfaatan sumber daya guna pencapaian tujuan baik dalam jangka menengah maupun jangka pendek.

Pada pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan dan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditentukan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berorientasi pada hasil, sehingga hasil kinerja kegiatan dapat terukur secara rasional, efisien dalam pendanaan serta pencapaian tujuan secara efektif.

Pada tahun 2016-2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah merencanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat/bidang- bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun kegiatan yang direncanakan ini mengacu dan menunjang program-program yang telah ditetapkan dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Kegiatan pada Program Rutin Penunjang Operasional.

Kegiatan yang menunjang Program Rutin/Penunjang Operasional dapat bersifat rutin operasional dengan waktu pelaksanaannya selama tahun Renstra. Dalam kegiatan ini lebih bersifat mendukung pelaksanaan administrasi rutin yang dilaksanakan pada tiap SKPD dan juga sebagai penunjang operasional perkantoran. Indikator kinerja dari kegiatan ini lebih kepada pengadaan barang dan jasa yang bersifat sebagai pendukung operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun kegiatan pada program rutin/penunjang operasional dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Kegiatan pada Program Rutin/Operasional dan Indikator Kinerjanya

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani; Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah item pemenuhan jasa komunikasi, air, listrik dalam satu tahun
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Badan/ operasional	Jumlah kendaraan Badan/operasional yang diuruskan izinnya dalam 1 Tahun
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun Jumlah tenaga kebersihan kantor
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item kebutuhan ATK kantor yang disediakan dalam satu tahun
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah item kebutuhan komponen dan instalasi listrik kantor yang disediakan dalam satu tahun
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah item kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam satu tahun
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu yang disediakan dalam satu tahun
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya perjalanan Badan rapat koorBadani dan konsultasi dalam dan luar daerah yang disediakan dalam satu tahun
	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah pakaian kerja yang disediakan
	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam satu tahun
	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun
	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bengkalis
Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bantan	
Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bukit Batu	
Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Siak Kecil	

	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Mandau
	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Pinggir
	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Rupert
	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Rupert Utara
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan kantor yang dibangun dalam satu tahun
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Badan	Jumlah rumah Dinas yang dipelihara dalam satu tahun
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item pemeliharaan Gedung Kantor yang disediakan dalam satu tahun
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dalam 1 tahun
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah item Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara dalam satu tahun
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan dalam satu tahun
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan renovasi dalam satu tahun
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang di dalam satu tahun
	Bimbingan Teknis Pengelolaan PAD	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Pengelolaan PAD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti bimtek dan workshop dalam 1 tahun
Program peningkatan Disiplin Aparatur	Pendidikan Informal	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti bimtek dan workshop dalam 1 tahun
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Pengadaan pakaian khusus Hari-hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Frekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap tertib administrasi pengelolaan media pungutan dan benda-benda berharga dalam 1 tahun
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah dalam 1 Tahun.

2) Kegiatan pada Program Prioritas

Kegiatan yang menunjang Program Prioritas merupakan kegiatan berfokus pada pencapaian visi dan misi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan pada kondisi lingkungan internal maupun eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun kegiatan pada program prioritas dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.2.
Kegiatan pada Program Prioritas dan Indikator Kinerja

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)
<i>Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</i>	Penagihan PAD	Terealisasinya Penerimaan Daerah Kabupaten Bengkalis
	Koordinasi penerimaan daerah	Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan dalam 1 Tahun
	Penatausahaan Piutang PAD	Tertibnya Administrasi Penerimaan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah
	Monitoring SKPD/SPTPD dan SPOP PBB P2	Terlaksananya Monitoring SKPD/SPTPD dan SPOP PBB P2 dalam 1 Tahun
	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan wajib pajak daerah dalam 1 tahun
	Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi 11 Jenis Pajak Daerah
	Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
	Pemutakhiran dan Evaluasi Zona Nilai Tanah (ZNT)	Tersedianya Data Zona Nilai Tanah (ZNT)
	Pemantauan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi	Terlaksananya Pemantauan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Pembentukan Updating Basis Data SISTEP ke Basis Data SISMIOP	Terwujudnya Basis Data SISMIOP yang Akurat
	Analisis Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) PBB P2	Tersedianya Data DBKB P2 yang Akurat
	Observasi dan Verifikasi Data objek Pajak BPHTB	Jumlah Wajib pajak BPHTB yang diobservasi dan diverifikasi dalam 1 tahun
	Penyampaian dan Monitoring SPPT PBB-P2	Jumlah SPPT PBB P2 yang Terdistribusi dalam 1 tahun
	Penagihan dan Penyisiran PBB-P2	Meningkatnya Penerimaan Pajak PBB-P2 Kab. Bengkalis
	Intensifikasi dan Stimulasi PBB-P2	Jumlah wajib pajak yang melunasi PBB P2 tepat waktu yang diberikan dalam 1 tahun
	Pendataan PBB - P2	Jumlah Objek PBB yang terdata dalam 1 tahun
	Peningkatan Kompetensi Juru Sita Pajak Daerah (Diklat)	Tersedianya Tenaga Juru Sita Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis
	Penyusunan peraturan perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan
	Bimtek Optimalisasi tentang SPTPD dan SSPD serta SKPD	Pembinaan kepada wajib pajak
	Bimtek Optimalisasi Pajak Daerah dan Benda-benda	Meningkatkan Kemampuan SDM dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah dalam 1 Tahun
	Inventarisasi dan Pengelolaan Media Pungutan dan Benda-Benda Berharga	Tertatanya Administrasi Media Pungutan dan Benda-Benda Berharga
	Pemuktakhiran data wajib Pajak daerah	Tersedianya data wajib pajak daerah yang akurat
	Penertiban Pajak daerah	Terlaksananya penertiban pajak daerah
	Pengelolaan data dan informasi pajak daerah	Informasi pajak daerah
	Gerakan Taat Pajak Daerah	Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah
	Peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) PBB P2	Tersedianya data NJOP PBB P2

Pembukuan PBB P2 dan BPHTB	Terlaksananya Pembukuan PBB P2 dan BPHTB
Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah
Analisa Potensi Pajak Daerah	Terlaksananya Analisa Potensi Pajak Daerah
Verifikasi Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Terlaksananya Penanganan Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah
Pelayanan Mobil Keliling PBB	Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling PBB
Penerapan Sistem Pajak Daerah Online	Terlaksananya Program Penerimaan Pajak Daerah Secara Online
Pengadministrasian Penagihan Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.	Tersusunya Penagihan dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak
Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak daerah
Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat.	Terlaksananya Rekonsiliasi dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat
Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah
Pengelolaan Pelayanan PBB-P2	Terlaksananya Pengelolaan PBB-P2
Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB	Terlaksananya Verifikasi SSPD BPHTB
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Frekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap tertib administrasi pengelolaan Media Pungutan dan Benda-Benda Berharga dalam 1 tahun
Rekonsiliasi dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pusat	Terlaksananya Rekonsiliasi dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pusat
Pembangunan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya Data Pajak Daerah Yang Update
Penerapan Sistem Pajak Daerah Online	Tersedianya Sistem Pengelolaan Pajak Daerah secara online

6.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

a. Pelaksanaan program rutin/penunjang operasional.

Tabel 6.3.
Indikator Hasil dan Kelompok Sasaran Pelaksanaan Program rutin/penunjang operasional Periode tahun 2016-2021

Program	Kegiatan	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcomes)	Kelompok Sasaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani; Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	Tingkat legalitas dokumen dan pengiriman dokumen.	Penyediaan jasa surat menyurat
	Penyediaan jasa komunikasi' sumber daya air dan listrik	jumlah item pemenuhan jasa komunikasi, air, listrik dalam satu tahun	Tingkat kelancaran operasional perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi' sumber daya air dan listrik
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Badan/ operasional	Jumlah kendaraan Badan/operasional yang diuruskan izinnya dalam 1 Tahun	Tingkat kelancaran operasional perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Badan/ operasional
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun Jumlah tenaga kebersihan kantor	Tingkat kelancaran operasional perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item kebutuhan ATK kantor yang disediakan dalam satu tahun	Tingkat kelancaraan pelaksanaan administrasi	Penyediaan alat tulis kantor

			nerkantoran	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	Tingkat kelancaraan pelaksanaan administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah item kebutuhan komponen dan instalasi listrik kantor yang disediakan dalam satu tahun	Tingkat Ketersediaan Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah item kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam satu tahun	Tingkat Ketersediaannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu yang disediakan dalam satu tahun	Tingkat ketersediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya perjalanan Badan rapat koorBadani dan konsultasi dalam dan luar daerah yang disediakan dalam satu tahun	Tingkat kelancaran Rapat-rapat KoorBadani dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koorBadani dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah pakaian kerja yang disediakan	Tingkat pelaksanaan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa keamanan kantor
	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam satu tahun	Tingkat pelaksanaan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa sopir kantor
	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bengkalis	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bengkalis	Penyediaan Pelayanan Administrasi di UPT Kec. Bengkalis
	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bantan	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bantan	Penyediaan Pelayanan Administrasi di UPT Kec. Bantan
	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bukit Batu	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bukit Batu	Penyediaan Pelayanan Administrasi di UPT Kec. Bukit Batu
	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Siak Kecil	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi di UPT Pendapatan Kec. Siak Kecil	Penyediaan Pelayanan Administrasi di UPT Kec. Siak Kecil
	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Mandau	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi di UPT Pendapatan Kec. Mandau	Penyediaan Pelayanan Administrasi di UPT Kec. Mandau
	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Pinggir	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi di UPT Pendapatan Kec. Pinggir	Penyediaan Pelayanan Administrasi di UPT Kec. Pinggir
	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Rupa	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi di UPT Pendapatan Kec. Rupa	Penyediaan Pelayanan Administrasi di UPT Kec. Rupa
	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Rupa Utara	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi di UPT Pendapatan Kec. Rupa Utara	Penyediaan Pelayanan Administrasi di UPT Kec. Rupa Utara
	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	Jumlah realisasi penggunaan Data/Informasi SKPD	Publikasi Informasi Pembangunan
Program	Pembangunan	Jumlah bangunan kantor yang		Pembangunan

peningkatan sarana dan prasarana aparatur	gedung kantor	dibangun dalam satu tahun		gedung kantor
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Tingkat pemenuhan kebutuhan akan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	Jumlah rumah Badan yang dipelihara dalam satu tahun	Tingkat kelancaran daJam pelaksanaan aktivitas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Badan
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item pemeliharaan Gedung Kantor yang disediakan dalam satu tahun	Tingkat kelancaran dalam pelaksanaan aktivitas	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Badan yang dipelihara dalam 1 tahun	Tingkat pemenuhan pemeliharaan, bahan bakar dan pajak kendaraan Badan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Badan/operasional
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah item Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Tingkat kelancaran pelaksanaan aktivitas operasional Perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan dalam satu tahun	Tingkat kelancaran pelaksanaan aktivitas operasional Perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan renovasi dalam satu tahun	Tingkat kelancaran pelaksanaan aktivitas operasional Perkantoran	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang di dalam satu tahun	Tesedianya kendaraan dinas/Operasional yang dalam satu tahun	Satu tahun
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Bimbingan Teknis Pengelolaan PAD	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Pengelolaan PAD	Terlatihnya SDM aparatur dalam pemungutan pajak	Bimbingan Teknis Pengelolaan PAD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti bimtek dan workshop dalam 1 tahun	Terlatihnya SDM aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Pendidikan Informal	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti bimtek dan workshop dalam 1 tahun	Terlatihnya SDM aparatur	Bimbingan Teknis Meningkatkan keahlian
Program peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	Peningkatan Kinerja Aparatur	Aparatur
	Pengadaan pakaian khusus Hari-hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga	Peningkatan Kinerja Aparatur	Aparatur
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Frekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap tertib administrasi pengelolaan media pungutan dan benda-benda berharga dalam 1 tahun	Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah	Sumber Pendapatan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah dalam 1 Tahun.	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Perencanaan , laporan-laporan.

b. Pelaksanaan Program prioritas

Tabel 6.4.
Indikator Hasil dan Kelompok
Sasaran Program Prioritas Periode Tahun 2016 - 2021

Program	Kegiatan	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcomes)	Kelompok Sasaran	KET
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Penagihan PAD	Terealisasinya Penerimaan Daerah Kabupaten Bengkalis	Peningkatan Penerimaan	Wajib Pajak Daerah	Bidang Penagihan dan Keberatan
	Koordinasi penerimaan daerah	Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan dalam 1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	Satu tahun	Sekretariat
	Penatausahaan Piutang PAD	Tertibnya Administrasi Penerimaan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	Tersedianya data piutang PAD	Wajib Pajak Daerah	Bidang Penagihan
	Monitoring SKPD/SPTPD dan SPOP PBB P2	Terlaksananya Monitoring SKPD/SPTPD dan SPOP PBB P2 dalam 1 Tahun	Terdistribusinya SKPD/SPTPD dan SPOP PBB P2	Wajib Pajak Daerah	Bidang Pendataan dan Pendaftaran
	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan wajib pajak daerah dalam 1 tahun	Tersedianya Jumlah Data Objek Pajak	Wajib Pajak Daerah	Bidang Pendataan dan Pendaftaran
	Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi 11 Jenis Pajak Daerah	Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak	Masyarakat	Bidang Pengembangan
	Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Daerah	Intansi Terkait	Bidang Pengembangan
	Pemutakhiran dan Evaluasi Zona Nilai Tanah (ZNT)	Tersedianya Data Zona Nilai Tanah (ZNT)	Terupdating data ZNT	Data Peta ZNT	Bidang Pendataan dan Pendaftaran
	Pembentukan Updating Basis Data SISTER ke Basis Data SISMIOIP	Terwujudnya Basis Data SISMIOIP yang Akurat	Terlaksananya Updating Basis Data	Data PBB P2	Bidang Pendataan dan Pendaftaran
	Analisis Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) PBB P2	Tersedianya Data DBKB P2 yang Akurat	Terlaksananya Updating Data Biaya Komponen Bangunan	Harga Pasar Bangunan	Bidang Pendataan dan Pendaftaran
	Observasi dan Verifikasi Data objek Pajak BPHTB	Jumlah Wajib pajak BPHTB yang diobservasi dan diverifikasi dalam 1 tahun	Terlaksananya Verifikasi Harga Nilai Jual	Objek Pajak BPHTB	Bidang Pendataan dan Pendaftaran
	Penyampaian dan Monitoring SPPT PBB-P2	Jumlah SPPT PBB P2 yang Terdistribusi dalam 1 tahun	Terdistribusinya SPPT PBB-P2	11 Kecamatan	Bidang Pendataan dan Pendaftaran
	Penagihan dan Penyisiran PBB-P2	Meningkatnya Penerimaan Pajak PBB-P2 Kab. Bengkalis	Terlaksananya pemungutan PBB-P2	Objek Pajak PBB P2	Bidang Penagihan dan Keberatan
	Intensifikasi dan Stimulasi PBB-P2	Jumlah wajib pajak yang melunasi PBB P2 tepat waktu yang diberikan dalam 1 tahun	Terlaksananya pemberian reward kepada wajib pajak	8 Kecamatan	Bidang Pengembangan
	Pendataan PBB - P2	Jumlah Objek PBB yang terdata dalam 1 tahun	Terlaksananya Pendataan PBB-P2	Objek Pajak PBB P2	Bidang Pendataan dan Pendaftaran
Peningkatan Kompetensi Juru Sita	Tersedianya Tenaga Juru Sita	Terlaksananya Pelatihan juru sita pajak daerah	Aparatur	Bidang Pengembangan	

Pajak Daerah (Diklat)	Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis				
Penyusunan peraturan perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Peraturan perundang-undangan	Peraturan pajak daerah	Bidang Pengembangan	
Bimtek Pembinaan dan Optimalisasi tentang SPTPD dan SSPD serta SKPD	Pembinaan kepada wajib pajak	Terlaksananya pembinaan dan optimalisasi SPTPD dan SSPD serta SKPD kepada wajib pajak	Wajib Pajak Daerah 8 Kecamatan	Bidang Pengembangan	
Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah dalam 1 Tahun	Peningkatan penerimaan pajak daerah	Wajib Pajak Daerah 8 Kecamatan	Bidang Penagihan dan Keberatan	
Inventarisasi dan Pengelolaan Media Pungutan dan Benda-Benda Berharga	Tertatanya Administrasi Media Pungutan dan Benda-Benda Berharga	Tertibnya Administrasi Media Pungutan dan Benda-Benda Berharga	Instansi terkait	Bidang Pengembangan	
Pemuktakhiran data wajib Pajak daerah	Tersedianya data wajib pajak daerah yang akurat	Data wajib pajak yang akurat	11 jenis pajak daerah	Bidang Pengembangan	
Penertiban Pajak daerah	Terlaksananya penertiban pajak daerah	Tertibnya pengelolaan pajak daerah	Wajib pajak daerah	Bidang Pengembangan	
Pengelolaan data dan informasi pajak daerah	Informasi pajak daerah	Terkelolanya data dan informasi pajak daerah	Masyarakat	Bidang Pengembangan	
Gerakan Taat Pajak Daerah	Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah	Peningkatan Kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah	Masyarakat	Bidang Pengembangan	
Peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) PBB P2	Tersedianya data NJOP PBB P2	Data NJOP PBB P2	Objek Pajak	Bidang Pengembangan	
Pembukuan PBB P2 dan BPHTB	Terlaksananya Pembukuan PBB P2 dan BPHTB	Tesedianya Data pembukuan PBB P2 dan BPHTB	Data PBB P2 dan BPHTB	Bidang Penerimaan dan Pembukuan	
Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah	Tesedianya Data pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah	Data pajak daerah dan retribusi daerah	Bidang Penerimaan dan Pembukuan	
Analisa Potensi Pajak Daerah	Terlaksananya Analisa Potensi Pajak Daerah	Tersedia Data Potensi Pajak Daerah	Data Potensi Pajak Daerah	Bidang Pengembangan	
Verifikasi Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Terlaksananya Penanganan Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Teselenggaranya Penanganan Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Satu tahun	Bidang Penagihan dan Keberatan	
Pelayanan Mobil Keliling PBB	Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling PBB	Peningkatan pelayanan PBB P2	11 Kecamatan	Bidang Pendataan dan Pendaftaran	
Penerapan Sistem Pajak Daerah Online	Terlaksananya Program Penerimaan Pajak Daerah Secara Online	Peningkatan penerimaan dan Pelayanan Pajak Daerah	3 Jenis Pajak Daerah	Bidang Pendataan dan Pendaftaran	
Pengadministrasian Penagihan Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.	Terlaksananya Penagihan dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak	Penagihan dana bagi hasil pajak dan non pajak	Terealisasinya Penerimaan dana bagi hasil pajak dan non pajak	Bidang Penagihan dan Keberatan	
Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Pajak daerah	Mendapatkan informasi atas wajib pajak yang di periksa	Wajib pajak yang di curigai	Bidang Penagihan dan Keberatan	
Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Frekuensi pelaksanaan rapat evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah dan jumlah peserta yang mengikuti rapat dalam 1 tahun	SKPD Terkait	Bidang Pengendalian dan Pengembangan	

Rekonsiliasi Dana Bagi hasil Pajak Provinsi dan Pusat.	Terlaksananya Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	Terealisasinya Penerimaan Daerah Kab. Bengkalis	Sumber Dana Bagi Hasil Daerah	Bidang Penerimaan dan Pembukuan
Pelayanan Pajak Daerah	Terkelolanya Administrasi Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	Kualitas Pelayanan dan Penerimaan Pajak Daerah	Wajib Pajak	Bidang Pendataan dan Pendaftaran
Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB	Terlaksananya Verifikasi SSPD BPHTB	Terverifikasi SSPD BPHTB	1 Kecataman	Bidang Penagihan dan Keberatan
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Frekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap tertib administrasi pengelolaann Media Pungutan dan Benda-Benda Berharga dalam 1 tahun	Memaksimalkan tingkat penerimaan pajak daerah	Objek pajak yang Terdaftar dan Yang belum terdaftar	Bidang Pengendalian dan Pengembangan
Rekonsiliasi dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pusat	Terlaksananya Rekonsiliasi dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pusat	Terealisasinya Penerimaan Daerah Kabupaten Bengkalis	Satu tahun	Bidang Penerimaan dan Pembukuan
Pengelolaan Pelayanan PBB-P2	Terlaksananya Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan PBB-P2	Peningkatan Pelayanan PBB-P2	Satu tahun	Bidang Pendataan dan Pendaftaran
Pembangunan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya Data Pajak Daerah Yang Update	Memaksimalkan Tikangkat Penerimaan Pajak Daerah	Sistem Informasi Pajak	Bidang Pendataan dan Pendaftaran
Penerapan Sistem Pajak Daerah Online	Tersedianya Sistem Pengelolaan Pajak Daerah secara online	Terlaksananya program penerimaan pajak daerah secara online	Satu tahun	Bidang Pendataan dan Pendaftaran

6.3. Pendanaan Indikatif

Untuk melaksanakan seluruh program kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah disusun, baik berupa program rutin/penunjang operasional maupun program prioritas perlu ditunjang dengan ketersediaan dana yang cukup memadai. Dengan ketersediaan dana yang cukup dan pada waktu yang tepat diharapkan dapat memperlancar jalannya program kegiatan tersebut. Ketersediaan dana tersebut dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun dari sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah menyusun rencana pendanaan pada setiap program dan kegiatan baik untuk program rutin/penunjang operasional maupun prioritas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun rincian pendanaan (pagu indikatif) program rutin/penunjang operasional dan program prioritas dapat dilihat pada lampiran 4.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis maupun RTRW Kabupaten Bengkalis serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Renstra SKPD. Arah masa depan daerah disebut sebagai Visi Pembangunan daerah, yang setidaknya terdiri dari : visi, misi dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan, rumusan visi harus tertuang dalam dokumen:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Yang masing-masing memiliki fungsi dan makna yakni :

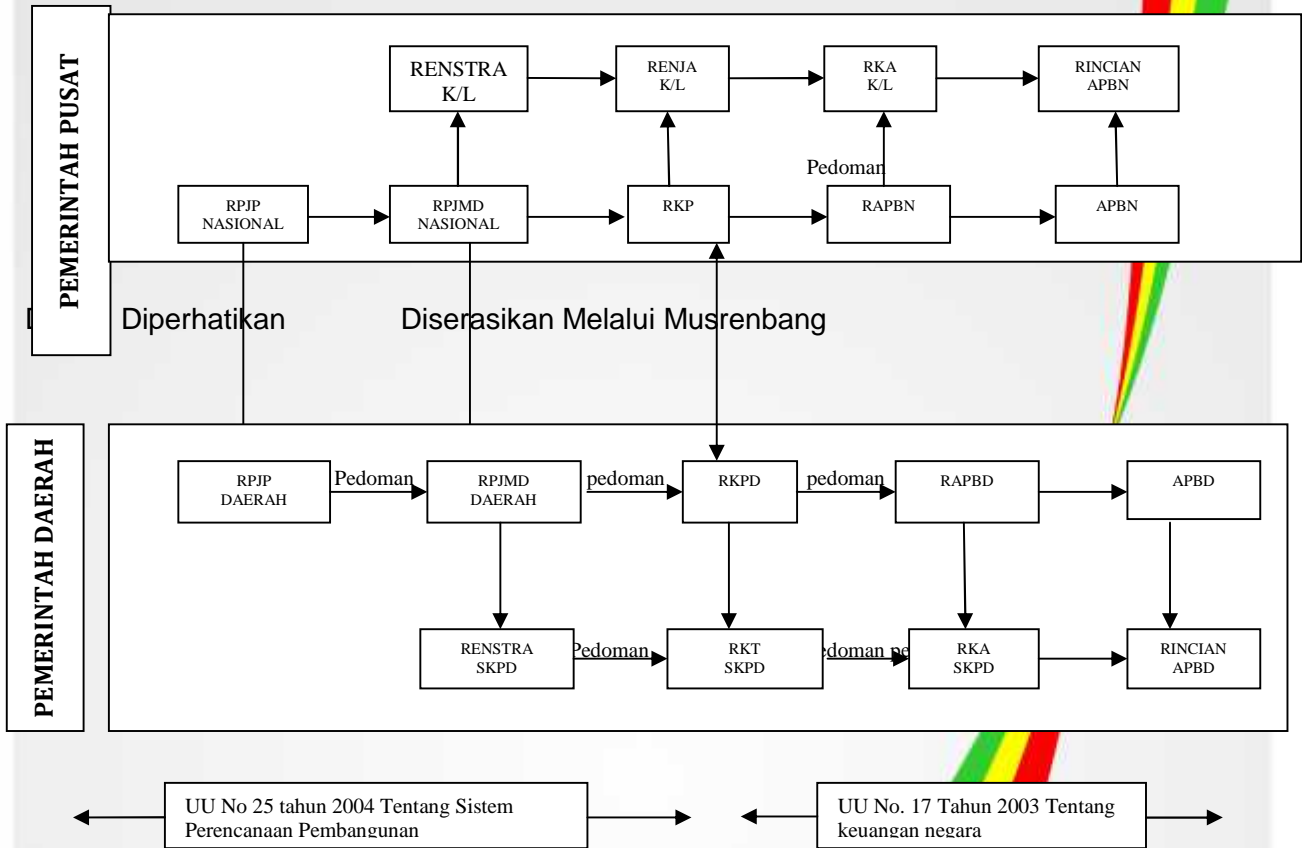
Visi RPJMD Memberikan arah yang nyata untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai konsekuensi dari sasaran 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD.

Visi Renstra SKPD Merupakan rumusan visi yang berorientasi untuk mencapai target yang tertuang dalam RPJMD.

Terkait tupoksi SKPD dari penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa RPJMD yakni harus ada indikator sasaran 5 (lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJMD. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan misi yang berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, SKPD yang bertanggungjawab terhadap misi pembangunan menindaklanjuti dengan menyusun Renstra SKPD. Kendati terjadi beberapa perubahan, baik sistematika maupun nama didalam dokumen perencanaan hingga terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, esensi utama tidak berubah yaitu dokumen perencanaan harus disusun secara partisipatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang menuntut adanya efisiensi dan efektifitas termasuk dibidang pengelolaan pendapatan daerah.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Diagram 7.1.
Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

MISI I Tujuan Ke 1

Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**).

Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penerimaan Pendapatan Daerah.

Sasaran Ke 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah.

Sasaran Ke 2 : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Daerah.

Sasaran SKPD yang mengacu kepada sasaran RPJMD dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur dan Transfaransi Pelayanan, yang terdiri 3 indikator sebagai berikut :

Indikator 1 : Persentase tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kondisi tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran pada tahun 2015 sebesar 80,00%, diharapkan akan selalu berjalan dengan baik dengan tingkat pemenuhannya sebesar minimal 80,00% setiap tahunnya, sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7.1.
INDIAKTOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Presentase Pelayanan Tepat Waktu	Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan	%	-	60%	70%	80%	90%
	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Penerapan Kualitas pelayanan yang akurat dan tepat waktu (hasil dari perhitungan quesioner di Bapenda)	%	-	85%	90%	95%	95%
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah yang Meningkat	Nilai absolut dari jumlah penerimaan/ pendapatan daerah dalam waktu tertentu	%	20%	40%	60%	80%	100%
	Rasio PAD Terhadap APBD	Besaran PAD terhadap Seluruh Pendapatan APBD	%	7%	7%	8%	9%	10%
Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Angka/hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai / Angka Score	CC	B	B	BB	BB

Dari tabel di atas dapat dilihat apa yang menjadi fokus utama dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya. Semua dirumuskan dan diturunkan dari Visi Misi Badan Pendapatan Daerah yang dapat dihitung dan terukur. Adapun target dari masing masing indikator kinerja sasaran itulah yang menjadi tolak ukur kinerja Badan Pendapatan Daerah disetiap tahun-tahunnya yang dirumuskan dalam bentuk Program dan Kegiatan sesuai dengan tupoksi Bapenda Kabupaten Bengkalis.

BAB VIII PENUTUP

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategis, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan recognized dan responded oleh semua stakeholders-nya. Perumusan perencanaan strategis akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni top-down dan bottom-up approach.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Renstra yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi. harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Adanya Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021, diharapkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan daerah.
2. Melalui Renstra, diharapkan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menjadi duta dalam sosialisasi konsep perencanaan strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
3. Dalam upaya penyempurnaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 diperlukan adanya proses pembelajaran dari aparaturnya agar selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
4. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan Renstra, aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis diharuskan memiliki personal mastery (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan lingkungan strategis yang dihadapi.

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2021

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	(21)					
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
						2017		2018		2019		2020		2021				a	Rp			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp							
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)										
Menciptakan Aparatur Pemerintah yang Profesional guna menunjang pengelolaan	Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah yang Profesional guna menunjang pengelolaan	1. Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani; Jumlah tenaga administrasi yang disediakan	1.114.000.000		1.169.700.000		1.228.185.000		1.289.594.250		1.354.073.963		6.155.553.213							Kab. Bengkalis
			Penyediaan jasa komunikasi' sumber daya air dan listrik	jumlah item pemenuhan jasa komunikasi, air, listrik dalam satu tahun	740.800.000		777.840.000		816.732.000		857.568.600		900.447.030		4.093.387.630							Kab. Bengkalis
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah kendaraan Badan/operasional yang diuruskan izinnya dalam 1	100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		552.563.125							Kab. Bengkalis
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun Jumlah tenaga	443.468.600		465.642.030		488.924.132		513.370.338		539.038.855		2.450.443.955							Kab. Bengkalis
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item kebutuhan ATK kantor yang disediakan dalam satu tahun	511.235.580		536.797.359		563.637.227		591.819.088		621.410.043		2.824.899.297							Kab. Bengkalis
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu	66.762.000		70.100.100		73.605.105		77.285.360		81.149.628		368.902.194							Kab. Bengkalis
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah item kebutuhan komponen dan instalasi listrik kantor yang disediakan dalam	38.000.000		39.900.000		41.895.000		43.989.750		46.189.238		209.973.988							Kab. Bengkalis
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah item kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	252.000.000		264.600.000		277.830.000		291.721.500		306.307.575		1.392.459.075							Kab. Bengkalis
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu yang disediakan dalam	146.000.000		153.300.000		160.965.000		169.013.250		177.463.913		806.742.163							Kab. Bengkalis
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya perjalanan Badan rapat koorBadani dan konsultasi	1.512.830.000		1.588.471.500		1.667.895.075		1.751.289.829		1.838.854.320		8.359.340.724							Kab. Bengkalis
			Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah pakaian kerja	416.100.000		436.905.000		458.750.250		481.687.763		505.772.151		2.299.215.163							Kab. Bengkalis
			Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam satu tahun	43.200.000		45.360.000		47.628.000		50.009.400		52.509.870		238.707.270							Kab. Bengkalis
			Pelayanan Jada Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Tertindakannya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bengkalis		80.000.000		84.000.000		88.200.000		92.610.000		97.240.500		442.050.500						
			Pelayanan Jada Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Tertindakannya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bantan dalam		100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		552.563.125						
			Pelayanan Jada Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Tertindakannya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bukit Batu		100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		552.563.125						
			Pelayanan Jada Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Tertindakannya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Siak Kecil		110.000.000		115.500.000		121.275.000		127.338.750		133.705.688		607.819.438						
			Pelayanan Jada Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan	Tertindakannya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Mandau		180.000.000		189.000.000		198.450.000		208.372.500		218.791.125		994.613.625						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											(20)	(21)	
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							2017		2018		2019		2020		2021		a			r
							Tar	Rp	Tar	Rp	Tar	Rp	Tar	Rp	Tar	Rp				
Pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pajak	penerimaan daerah	Pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi	Penagihan PAD	Terealisasinya Penerimaan Daerah Kabupaten Bengkalis			491.981.500	850.000.000	935.000.000	1.028.500.000	1.131.350.000	4.436.831.500	Kab. Bengkalis							
			Koordinasi penerimaan daerah	Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan dalam 1 Tahun		1.800.000.000	1.980.000.000	2.079.000.000	2.182.950.000	2.292.097.500	10.334.047.500	Kab. Bengkalis								
			Penatausahaan Piutang PAD	Tertibnya Administrasi Penerimaan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah		196.126.000	430.025.000	473.027.500	520.330.250	572.363.275	2.191.872.025	Kab. Bengkalis								
			Monitoring SKPD/SPTPD dan SPOP PBB P2	Terlaksananya Monitoring SKPD/SPTPD dan SPOP PBB P2 dalam 1 Tahun		-	432.000.000	475.200.000	522.720.000	574.992.000	2.004.912.000	Kab. Bengkalis								
			Pendataan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan wajib pajak daerah dalam 1 tahun		300.000.000	432.000.000	475.200.000	522.720.000	574.992.000	2.304.912.000	Kab. Bengkalis								
			Sosialisasi Peraturan tentang Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi 11 Jenis Pajak Daerah		-	216.000.000	237.600.000	261.360.000	287.496.000	1.002.456.000	Kab. Bengkalis								
			Rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		49.000.000	95.000.000	104.500.000	114.950.000	126.445.000	489.895.000	Kab. Bengkalis								
			Pemutakhiran dan Evaluasi Zona Nilai Tanah (ZNT)	Tersedianya Data Zona Nilai Tanah (ZNT)		-	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000	185.640.000	Kab. Bengkalis								
			Pemantauan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya pemantauan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		-	550.000.000	561.000.000	572.220.000	583.664.400	2.266.884.400	Kab. Bengkalis								
			Analisis Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) PBB P2	Tersedianya Data DBKB P2 yang Akurat		-	300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000	1.392.300.000	Kab. Bengkalis								
			Observasi dan Verifikasi Data objek Pajak BPHTB	Jumlah Wajib pajak BPHTB yang diobservasi dan diverifikasi dalam 1 tahun		100.000.000	105.000.000	115.500.000	127.050.000	139.755.000	587.305.000	Kab. Bengkalis								
			Penyampaian dan Monitoring SPPT PBB-P2	Jumlah SPPT PBB P2 yang Terdistribusi dalam 1 tahun		377.500.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	1.464.100.000	5.482.600.000	Kab. Bengkalis								
			Penagihan dan Penyisiran PBB-P2	Meningkatnya Penerimaan Pajak PBB-P2 Kab. Bengkalis		582.149.200	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	4.182.149.200	Kab. Bengkalis								
			Intensifikasi dan Stimulasi PBB-P2	Jumlah wajib pajak yang melunasi PBB P2 tepat waktu yang diberikan dalam 1 tahun		613.392.400	618.000.000	679.800.000	747.780.000	822.558.000	3.481.530.400	Kab. Bengkalis								
			Pendataan PBB - P2	Jumlah Objek PBB yang terdata dalam 1 tahun		1.500.000.000	2.500.000.000	2.625.000.000	2.756.250.000	2.894.062.500	12.275.312.500	Kab. Bengkalis								
			Peningkatan Kompetensi Juru Sita Pajak Daerah (Diklat)	Tersedianya Tenaga Juru Sita Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis		-	-	200.000.000	210.000.000	220.500.000	630.500.000	Kab. Bengkalis								
			Penyusunan peraturan perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan		-	216.000.000	237.600.000	261.360.000	287.496.000	1.002.456.000	Kab. Bengkalis								
			Bimtek Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Benda Benda	Meningkatkan Kemampuan SDM dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		-	310.000.000	325.500.000	341.775.000	358.863.750	1.336.138.750	Kab. Bengkalis								
			Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah dalam 1 Tahun		-	300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000	1.392.300.000	Kab. Bengkalis								
			Inventarisasi dan Pengelolaan Media Pungutan dan Benda-	Tertatanya Administrasi Media Pungutan dan Benda-Benda Berharga		-	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	696.150.000	Kab. Bengkalis								
Pemuktakhiran data wajib Pajak daerah	Tersedianya data wajib pajak daeah yang akurat		-	550.000.000	605.000.000	665.500.000	732.050.000	2.552.550.000	Kab. Bengkalis											

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi						
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD										
						2017		2018		2019		2020		2021		a	r									
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp											
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)							
			Penertiban Pajak daerah	Terlaksananya penertiban pajak daerah				-		500.000.000			550.000.000			605.000.000			665.500.000			2.320.500.000			Kab. Bengkulu	
			Pengelolaan data dan informasi pajak daerah	Informasi pajak daerah			-			400.000.000			440.000.000			484.000.000			532.400.000			1.856.400.000			Kab. Bengkulu	
			Gerakan Taat Pajak Daerah	Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah			-			750.000.000			825.000.000			907.500.000			998.250.000			3.480.750.000			Kab. Bengkulu	
			Peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) PBB P2	Tersedianya data NJOP PBB P2			-			550.000.000			605.000.000			665.500.000			732.050.000			2.552.550.000			Kab. Bengkulu	
			Pembukuan PBB P2 dan BPHTB	Terlaksananya Pembukuan PBB P2 dan BPHTB			-			176.580.000			194.238.000			213.661.800			235.027.980			819.507.780			Kab. Bengkulu	
			Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah			-			253.445.000			278.789.500			306.668.450			337.335.295			1.176.238.245			Kab. Bengkulu	
			Analisa Potensi Pajak Daerah	Terlaksananya Analisa Potensi Pajak Daerah			-			-			200.000.000			220.000.000			242.000.000			662.000.000			Kab. Bengkulu	
			Verifikasi Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Pajak	Terlaksananya Penanganan Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah			-			450.000.000			495.000.000			544.500.000			598.950.000			2.088.450.000			Kab. Bengkulu	
			Pelayanan Mobil Keliling PBB	Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling PBB			-			150.000.000			150.000.000			165.000.000			181.500.000			646.500.000			Kab. Bengkulu	
			Penerapan Sistem Pajak Daerah Online	Terlaksananya Program Penerimaan Pajak Daerah secara Online						1.147.651.000			1.361.473.000			1.497.620.300			1.647.382.330			5.654.126.630			Kab. Bengkulu	
			Pengadministrasian Penagihan Dana bagi Hasil Pajak dan Non Pajak	Tersusunnya Penagihan Dana bagi hasil Pajak dan Non Pajak									394.840.000			434.324.000			477.756.400			1.306.920.400			Kab. Bengkulu	
			Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah									430.850.000			473.935.000			521.328.500			1.426.113.500			Kab. Bengkulu	
			Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah						310.600.000			430.850.001			473.935.001			521.328.501			1.736.713.503			Kab. Bengkulu	
			Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pusat	Terlaksananya Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pusat						93.076.000			430.850.002			473.935.002			521.328.502			1.519.189.507			Kab. Bengkulu	
			Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah						499.970.000			430.850.003			473.935.003			521.328.504			1.926.083.510			Kab. Bengkulu	
			Pengelolaan Pelayanan PBB-P2	Terlaksananya Pengelolaan PBB-P2					400.000.000				600.000.000			630.000.000			661.500.000			694.575.000			2.986.075.000	Kab. Bengkulu
			Pembangunan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya Data Pajak Daerah Yang Update				-					250.000.000			262.500.000			275.625.000			788.125.000			Kab. Bengkulu	
			Penerapan Sistem Pajak Daerah Online	Tersedianya Sistem Pengelolaan Pajak Daerah secara online				-					975.000.000			1.023.750.000			1.074.937.500			1.128.684.375			4.202.371.875	Kab. Bengkulu
			Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB	Terlaksananya Verifikasi SSPD BPHTB				-					300.000.000			330.000.000			363.000.000			399.300.000			1.392.300.000	Kab. Bengkulu
			Rekonsiliasi dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan	Terlaksananya Rekonsiliasi dana Bagi Hasil Pajak Propinsi				-					161.568.000			169.646.400			178.128.720			187.035.156			696.378.276	Kab. Bengkulu
Mengoptimalkan	Peningkatan	1. Optimalisasi	6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah																							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						2017		2018		2019		2020		2021		a	r		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
n pendapatan daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Frekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap tertib administrasi pengelolaan Media Pungutan dan Benda-Benda Barbaru dalam 1 tahun			492.814.650		542.096.115		569.200.921		597.660.967		627.544.015		2.829.316.668		Kab. Bengkulu
Mengoptimalkan pendapatan daerah	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Optimalisasi	7. Program peningkatan dan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan																
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan perangkat Daerah dalam 1 tahun							186.618.000		195.948.900		205.746.345		588.313.245		Kab. Bengkulu
						-	21.242.487.642		37.051.517.587		40.230.046.873		43.437.937.541		45.802.957.976		187.764.947.620		

Bengkalis, Juli 2019
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



H. IMAM HAKIM, SP., M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19631112 199003 1 005